



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Mei 2018/Periodik - 2017)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL
SUB UNIT KERJA : PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IMAM MARGONO
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN UMUM
3. NHK : 66764

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.600.790.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 264 m2/170 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 594.056.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 422 m2/100 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 113.516.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 234 m2/119 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 732.000.000
4. Tanah Seluas 114 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 61.218.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 247 m2/245 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 2.100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 363.000.000

1. MOBIL, HONDA FREED MINIBUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
2. MOBIL, HONDA BRIO BRIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 161.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 75.115.564**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 4.199.905.564



III. HUTANG

Rp. 1.514.209.861

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.685.695.703

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **26 Oktober 2018**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.